

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

##### **4.1.1. Kesiapan Pemerintah Desa dalam penerapan SISKEUDES**

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Struktur organisasi pada Perangkat Desa Tamantirto sudah sesuai dengan Peraturan Desa Tamantirto Nomor 02 Tahun 2014 tentang SOTK Pemerintah Desa Tamantirto, akan tetapi tidak semua perangkat desa memiliki kemampuan dalam TI.
2. BPD dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa melalui SISKEUDES dapat dikatakan siap. Pengawasan yang dilakukan seperti pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pada umumnya.
3. Masyarakat masih belum memahami pentingnya partisipasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran desa. Oleh karena itu perlu sosialisasi lebih luas pada masyarakat terkait keuangan desa.
4. Latar belakang pendidikan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mayoritas adalah SLTA. Pada Kepala Urusan Keuangan latar belakang pendidikannya hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Relasi antara kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dengan latar belakang pendidikan sangat berpengaruh.
5. Pelatihan terhadap user SISKEUDES sebagai penginput laporan keuangan desa di Desa Tamantirto sudah dikatakan siap karena sudah mengikuti pelatihan

sebanyak lima kali. Dalam penelitian ini penulis memiliki keterbatasan terkait data pelatihan pada Pemerintah Desa Tamantirto.

6. Di kantor Desa Tamantirto sendiri memiliki 2 buah komputer yang dapat digunakan untuk menunjang aktivitas di kantor dan 3 notebook. Akan tetapi bendahara dan kaur keuangan tidak diberi tanggungjawab dalam menggunakannya.
7. Pada pengelolaan keuangan desa terjadi perubahan pada anggaran pendapatan desa di Tamantirto dikarenakan terjadinya penambahan juga pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan. Tahapan Pengelolaan keuangan desa di desa Tamantirto yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban.
8. Di Desa Tamantiro kompetensi SDM lebih didasarkan pada pengalaman, akan tetapi pengalaman lamanya bekerja belum tentu menjadikan perangkat desa dapat mengikuti perubahan-perubahan terhadap sistem akuntansi yang ada.
9. Pemerintah Desa Tamantirto memberikan anggaran khusus yang masuk dalam kegiatan operasional perkantoran pada belanja desa yaitu pemeliharaan alat kantor dan rumah tanngga. Tidak ada anggaran untuk perbaikan aplikasi karena merupakan tanggung jawab BPKP selaku pengembang aplikasi.

#### **4.1.2. Hambatan dalam SISKEUDES**

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Lemahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan TI pada perangkat desa masih rendah.
2. Lambatnya koordinasi terkait pelatihan TI oleh kepala desa

3. Tidak ada training atau pelatihan pada BPD di desa Tamantirto terkait fungsi pengawasan terhadap SISKEUDES.
4. Fasilitas (sarana) penunjang pengelolaan keuangan desa tidak diberikan kepada perangkat desa yang sesuai dengan tugas pokoknya.
5. Kurangnya partisipasi masyarakat dan lemahnya tingkat pemahaman masyarakat terkait pentingnya peran masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa

#### **4.2. Saran:**

Berkaitan dengan hasil penelitian ini, maka penulis mencoba merekomendasikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Tamantirto sebaiknya dapat mengelola website desa dengan baik sbagai wujud transparansi desa. dalam website desa sebaiknya Memuat informasi terkait keuangan desa, realisasi penggunaan anggaran anggaran, maupun informasi-informasi lain terkait desa ataupun kegiatan yang dilakukan desa pada webssite desa. Desa Tamantirto masih jauh tertinggal dalam hal pengelolaan teknologi informasi.
2. Terkait Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang TI, sebaiknya pemerintah desa mengikuti pelatihan secara kontinyu dan merata. Pemerintah desa juga seharusnya melakukan evaluasi kinerja perangkat desa untuk mengetahui sejauh mana perangkat desa menerapkan ilmu yang didapat dalam pelatihan. Kemudian perlunya pencatatan jumlah pelatihan dan pelatihan apa

saja yang telah diikuti oleh perangkat desa untuk memudahkan evaluasi kinerja berdasarkan pelatihan yang telah dilakukan.

3. Perlunya meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan desa.
4. Perlunya revitalisasi terhadap pegawai atau perangkat desa yang tidak memiliki keahlian dalam mengerjakan tugas yang dibebarkannya. Revitalisasi juga perlu dilakukan pada pegawai atau perangkat desa yang tingkat produktivitas pekerjaannya rendah.
5. Perlunya peningkatan kuantitas pada user SISKEUDES agar tercipta efisiensi waktu dan tenaga dalam penginputan data.